

Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Aceh dan Papua Tengah periode 2023 – 2024

Amelia Rahmawati¹, Mufid Suryani²

¹²Universitas Gunadarma, Ekonomi, Akuntansi

*Korespondensi : Mufid_suryani@staff.gunadarma.ac.id

Article Info	Abstrak
Article history: Received: 17 Desember 2025 Accepted: 22 Desember 2025 Published: 27 Desember 2025	Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui penguatan kapasitas fiskal. Namun, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih menjadi permasalahan, khususnya pada daerah penerima dana otonomi khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dan Papua Tengah pada periode 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang mencakup seluruh kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Meskipun demikian, secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal, dan memberikan bukti empiris terbaru pada daerah penerima dana otonomi khusus pasca pembentukan Provinsi Papua Tengah. Kata Kunci : <i>Dana otonomi Khusus, Dana Perimbangan, Kemandirian keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemiskinan</i>

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan strategis yang diterapkan di berbagai negara untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah guna mendukung pembiayaan belanja daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penerapan desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Pada berbagai negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) maupun negara-negara ASEAN, desentralisasi fiskal menghadapi tantangan yang kompleks. Sejumlah studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu berdampak positif, karena dalam beberapa kasus justru menurunkan efektivitas redistribusi pendapatan dan menghambat pemerataan pembangunan antar wilayah, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah.

Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia telah menganalisis hubungan antara pendapatan asli daerah, dana transfer, dan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian umumnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sementara dana perimbangan cenderung meningkatkan ketergantungan fiskal. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada daerah non-otonomi khusus, menggunakan periode pengamatan sebelum terbentuknya Provinsi Papua Tengah, serta belum secara komprehensif menguji dominansi pendapatan asli daerah dibandingkan dana transfer pusat, khususnya dana otonomi khusus.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap berupa minimnya kajian empiris pasca pembentukan Provinsi Papua Tengah serta keterbatasan penelitian yang membandingkan secara langsung pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah pada wilayah penerima dana otonomi khusus. Selain itu, pemilihan periode 2023–2024 menjadi relevan secara akademik karena mencerminkan fase awal konsolidasi fiskal dan penyesuaian kebijakan keuangan daerah setelah pembentukan Papua Tengah, sekaligus menggambarkan dinamika terkini pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, serta mengidentifikasi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Tengah pada periode 2023–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Tengah pada periode 2023–2024. Metode sampling jenuh digunakan sehingga seluruh populasi dijadikan sampel dengan jumlah observasi sebanyak 62. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan, sedangkan variabel independen meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan. Hubungan antarvariabel dianalisis menggunakan regresi data panel. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 10%. Keterbatasan penelitian terletak pada periode pengamatan yang relatif singkat, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika jangka panjang kemandirian keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Temua Data Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Aceh dan Papua Tengah

Analisis temuan empiris mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Tengah selama periode 2023–2024, difokuskan pada gambaran umum kondisi kemandirian keuangan daerah serta faktor-faktor fiskal yang mempengaruhi berdasarkan hasil pengolahan data panel. Penyajian hasil penelitian ini dilakukan secara ringkas melalui tabel ringkasan statistik dan hasil estimasi model, tanpa menguraikan tahapan teknis pengujian statistik, guna menekankan pada temuan substantif yang relevan secara kebijakan. Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistic Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Kemandirian Keuangan Daerah	62	0.429	42.933	11.398	8.047
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	62	1.290	1.776.220	139.734	226.745
Dana Perimbangan	62	411.361	2.951.097	885.510	447.057
Dana Otonomi Khusus	62	20.439	268.421	78.438	68.283
Tingkat Kemiskinan (%)	62	6.950	41.420	19.162	9.211

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1, tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dan Papua Tengah menunjukkan variasi yang cukup tinggi antar kabupaten/kota. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 11,398 dengan standar deviasi 8,047 mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah dan belum merata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rentang yang sangat lebar, tercermin dari perbedaan nilai minimum dan maksimum yang signifikan, yang menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Pola serupa juga terlihat pada dana perimbangan dan dana otonomi khusus, yang mencerminkan perbedaan besaran transfer fiskal yang diterima oleh masing-masing daerah. Sementara itu, tingkat kemiskinan menunjukkan variasi yang cukup besar, mengindikasikan perbedaan kondisi sosial ekonomi yang berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan.

2. Ringkasan Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji dalam tahapan ini adalah untuk memilih model mana yang terbaik digunakan, model yang di bandingkan adalah Pooled Ordinary Least Square (Pooled OLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji

Pengujian	Model Dibandingkan	Probabilitas Model Terpilih	
Uji Chow	<i>Pooled OLS vs Fixed Effect</i>	0.0000	<i>Fixed Effect</i>
Uji Hausman	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	0.0138	<i>Fixed Effect</i>

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) sehingga model fixed effect lebih tepat dibandingkan pooled OLS. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas 0,0138 ($< 0,05$) yang menegaskan bahwa model fixed effect merupakan model terbaik untuk mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dan Papua Tengah.

3. Ringkasan Hasil Regresi Data Panel

Tabel berikut merangkum hasil estimasi model fixed effect yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Papua Tengah.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien	Arah Pengaruh	Probabilitas	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.022887	Positif	0.0000	Signifikan
Dana Perimbangan	-0.015000	Negatif	0.0944	Signifikan
Dana Otonomi Khusus	-5.930000	Negatif	0.9970	Tidak signifikan
Tingkat Kemiskinan	0.680000	Positif	0.5446	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan koefisien sebesar 0,022887 dan nilai probabilitas 0,0000. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan PAD secara nyata meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja dan pembangunan tanpa ketergantungan pada dana transfer pusat. Sebaliknya, dana perimbangan memiliki koefisien negatif sebesar $-0,015000$ dengan nilai probabilitas 0,0944, yang mengindikasikan bahwa peningkatan dana perimbangan justru menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga memperkuat pola ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan masing-masing memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9970 dan 0,5446, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dana otonomi khusus dan penurunan tingkat kemiskinan penting dalam mendukung pemerataan pembangunan

dan kesejahteraan sosial, keduanya belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam periode pengamatan yang relatif pendek.

2. Analisis Fundamentar Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal lokal merupakan faktor utama dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan kemampuan optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan sumber PAD lainnya cenderung memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaidan dan Elmi (2021), yang juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh baik secara parsial maupun secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menggambarkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan

Dana perimbangan terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan adanya fenomena transfer dependency, di mana daerah cenderung kurang terdorong untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli ketika alokasi dana transfer relatif besar.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hostf Prio Da Gama, Rusman Soleman, dan Hartaty Hadady (2022), yang menemukan bahwa dana perimbangan berdampak negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Sari dan Abdullah (2019) yang menekankan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dapat melemahkan insentif daerah dalam melakukan inovasi fiskal.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana otonomi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus belum mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah secara langsung. Dana otonomi khusus pada umumnya bersifat earmarked, difokuskan pada pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan daerah. Kondisi ini menciptakan soft budget constraint, di mana pemerintah daerah berada dalam zona kenyamanan fiskal dan kurang terdorong untuk memperluas basis PAD.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Machfud, Asnawi, dan Naz'aina (2020), yang menyatakan bahwa dana otonomi khusus lebih berperan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dibandingkan sebagai pendorong kemandirian fiskal.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan indikator sosial yang dampaknya terhadap kemandirian fiskal bersifat tidak langsung. Penurunan tingkat kemiskinan memang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, namun dalam jangka pendek belum secara otomatis meningkatkan PAD daerah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Machfud, Asnawi, dan Naz'aina (2020), yang menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kemandirian fiskal cenderung lemah dalam periode pengamatan yang pendek.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama (simultan), keempat variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya, Koefisien Determinasi (R^2) yang diperoleh adalah sebesar 0,965442. Nilai ini menggambarkan bahwa sekitar 96.54% variasi dalam tingkat kemandirian Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan. Sementara itu, sisanya sebesar 3.46% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 96,5% menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang sangat tinggi dalam menjelaskan variasi tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingginya nilai ini dipengaruhi oleh penggunaan Fixed Effect Model yang mampu menangkap karakteristik spesifik masing-masing daerah yang tidak teramati secara langsung. Selain itu, periode pengamatan yang relatif pendek turut berkontribusi terhadap tingginya nilai koefisien determinasi. Kedua, periode pengamatan yang relatif pendek, yaitu hanya mencakup tahun 2023–2024, turut berkontribusi terhadap tingginya nilai R^2 . Dalam periode yang singkat, variasi data cenderung terbatas dan pola hubungan antar variabel menjadi lebih stabil, sehingga model lebih mudah menjelaskan variasi yang ada. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fenomena overfitting, di mana model sangat sesuai dengan data sampel tetapi belum tentu memiliki kemampuan prediktif yang kuat untuk periode yang lebih panjang.

Tingginya nilai R^2 juga mencerminkan bahwa struktur kemandirian keuangan daerah di Aceh dan Papua Tengah masih sangat ditentukan oleh faktor-faktor fiskal utama, khususnya PAD dan transfer pemerintah pusat. Artinya, variasi kemandirian keuangan daerah belum banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti inovasi kebijakan fiskal, diversifikasi ekonomi daerah, atau efisiensi belanja publik. Dengan kata lain, kemandirian keuangan daerah masih bersifat struktural dan belum dinamis, dengan nilai R^2 yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang ada

sudah optimal, melainkan justru mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap variabel-variabel fiskal tradisional masih sangat dominan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan periode observasi yang lebih panjang serta penambahan variabel institusional dan ekonomi regional diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan Konteks Regional Provinsi Aceh dan Papua Tengah

Provinsi Aceh memiliki struktur fiskal yang relatif lebih matang dengan kapasitas PAD yang lebih stabil, meskipun masih bergantung pada dana transfer dan dana otonomi khusus. Sebaliknya, Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi hasil pemekaran masih berada pada tahap awal konsolidasi fiskal dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dan dana otonomi khusus. Dengan adanya Perbedaan karakteristik institusional dan historis ini menjelaskan mengapa dana otonomi khusus belum mampu mendorong kemandirian keuangan daerah secara signifikan di kedua wilayah Provinsi ini. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal berbasis transfer perlu diiringi dengan strategi penguatan basis ekonomi lokal agar tujuan kemandirian fiskal dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pendapatan asli daerah (PAD) terbukti berperan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dan Papua Tengah, sementara dana perimbangan menunjukkan hubungan negatif yang mencerminkan masih kuatnya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut belum mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Secara simultan, seluruh variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan PAD sebagai variabel yang paling dominan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode pengamatan yang relatif singkat serta keterbatasan jumlah variabel yang digunakan, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika jangka panjang kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memprioritaskan penguatan PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal serta mengarahkan pemanfaatan dana transfer, khususnya dana otonomi khusus, ke sektor-sektor produktif yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, menambahkan variabel fiskal dan kelembagaan, serta memperluas cakupan wilayah guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2013. "Akuntansi pemerintahan."
- Alfian Mujiwardhani, Setiawan, Nawawi. 2022. "Dana Alokasi Khusus Di Indonesia."
- Azwar. 2022. "Analisis Dinamis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja Kesehatan Dan Kesejahteraan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan." Azwar. 2023. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 7

Christian, Willy. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019."

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan "Laporan APBD dan TKKD Provinsi Aceh Papua Tengah Tahun 2023 dan 2024

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=7&tahun=2023&provisi=01&pemda=17> (Diakses Juli 2025)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. "Laporan Pengelolaan DBH CHT." Fiscal, Oecd, And Decentralisation Database. 2024. "Tax Autonomy Indicators".

Fitri, Sri, Et Al. 2023. "Pemerintahan." In Akuntansi Pemerintahan,.

Group, World Bank. 2024. "Thailand Economic Monitor, July 2024: Unlocking The Growth Potential Of Secondary Cities."

Husin, Saparuddin, dan Purnaman. 2025. "Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Kendari." Jurnal Akuntansi Dan Keuangan

Iba, Zainuddin, dan Wardhana. 2024. Metode Penelitian Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis.

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. 2024. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Trasfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus." Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024

Indonesia, Pemerintah. 2014. "Law Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2014 About Local Government." Mendagri

Kadafi, Muhammad, dan Murtala. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017."

Katjong, Kadir, anuaria, Polontoh, dan Mulyadi. 2024. "Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."

Kemenkeu, Kementrian Keuangan. 2024. "Informasi APBN Tahun Anggaran 2025."

Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II

Kementerian Keuangan. 2017. "Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Handbook Of Allocation Of Natural Resources Revenue Sharing Funds)." Kementerian Keuangan (Ministry Of Finance):

Kementrian Keuangan RI. 2017. "Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah."

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)mKeuangan, Kementrian. 2021. "Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY."

Kristina, Et Al. 2021. "The Effect Of Local Revenue (Pad) And Balancing Funds On The Regional Financial Independence Of Central Halmahera District."

Lewis, Blane. 2023. "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment." Bulletin Of Indonesian Economic Studies.

Listari, Harianto, dan Widuri. 2022. "Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

Machfud, Asnawi, dan Naz'aina. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh."

Ministry Of Finance. 2024. "Budget In Brief 2024."

Mulia, Yang. 2021. "Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016."

Nazikha, Resi, dan Rahmawati. 2021. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal Daerah, Dan Elastisitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia.

Nordiawan, Deddy, Putra, dan Rahmawati. 2008. Akuntansi Pemerintahan.

Nurkhayati. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo.

Of, Bureau, And T H E Budget. 2024. Thailand ' S Budget.

On, A Report, The Mandanas-Garcia Supreme, And Court Ruling. 2022.

"Decentralization, Digitalization, And Development."

Pengembangan. 2022. "Desentralisasi, Digitalisasi, Dan Pengembangan." In Desentralisasi, Digitalisasi, Dan Pengembangan,.

Pietrovito, Filomena, Pozzolo, Resce, dan Scialà. 2023. "Fiscal Decentralization And Income (Re)Distribution In OECD Countries' Regions.

PMK/18/PMK.07/2023/2023, And UU/1/2022. 2023. "Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus."

Presiden Republik Indonesia. 2022. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023."

Puspita, Dewi, dan Hamidi. 2021. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Desentralisasi Fiskal Dua Dekade Implementasi.

Reyes, 2019. "Decentralized Urban Governance. Local Government Quarterly."

Sathierbach, Karsten Et Al. 2015. "Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah."

Sihombing, dan Robinson. 2022. PT Dewangga Energi Internasional Aplikasi EIEWS Untuk Statistisik Pemula.

Sudrajat, Amir, Arisdiyoto, Aviani, Judijanto, Suryawati, Heriyanto Khair, M.Si., M.H., Dwitayanti. 2016. 4 CV. Mitra Mandiri Persada Otonomi Daerah Dan Good Governance.

Sugiyanto, Sugiyanto, dan Musfirati. 2021. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah."

Sujanto, Alex. 2023. "Tantangan Dalam Pemenuhan Dana Alokasi Umum Spesific Grant."

Syahrijal, Hidayat. 2021. "Buku Ajar Akuntansi Pemerintah PT Inovasi Pratama Internasional.

Tata Et Al. 2023. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa."

Wildayanti, W. 2024. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap belanja Daerah ".

Zahidah, dan Dientri. 2023. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Lamongan."